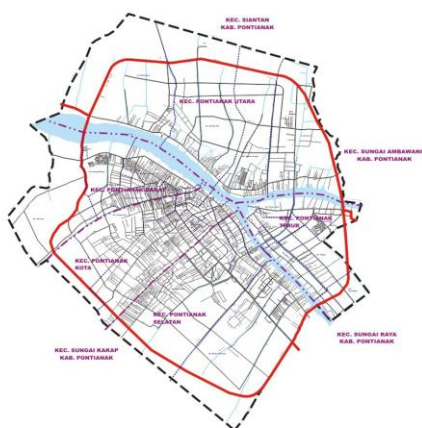


RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK**



KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Dinas Perhubungan Kota Pontianak menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 (Tahun ke-4) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020 s/d 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan penyesuaian dan perubahan terhadap RENJA awal/murni tahun 2023 yang disusun pada tahun berjalan. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 memberikan gambaran terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dan berdasarkan prioritas kebutuhan pencapaian tujuan Perangkat Daerah pada tahun 2023 dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja Perubahan ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan RENJA menuju Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang responsive dan aspiratif.

Pontianak, Juli 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pontianak,

Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI .M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680410 199503 2 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022	II-1
III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	III-1
3.1. Rencana Kerja	III-1
3.2. Pendanaan	III-14
IV. PENUTUP	IV-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana–rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selain itu Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan salah satu dokumen yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah Perlu melakukan penyusunan terhadap Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan sebagai evaluasi dan penyesuaian terhadap perubahan Kegiatan dan proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2022 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja



- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
 15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).



18. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 123)
19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 9.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024;
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 53.2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 9.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024;
21. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
22. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024;
23. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2023 disusun dengan maksud menyiapkan dokumen sinkronisasi dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2023 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Pontianak disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2023) hingga pelaksanaan pada Triwulan II, mengacu pada APBD murni tahun berjalan (2023), yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 hingga Triwulan II.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat uraian tentang Rencana Kerja yaitu Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun Berjalan.

BAB IV. PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

Dalam rencana jangka waktu 5 tahun yaitu 2020-2024, dan hingga Triwulan ke II tahun keempat (2023) atau tahun berjalan, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan Bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis serta program yang dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak yaitu sebagaimana berikut :

1. Sasaran ***Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Sasaran ***Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
 - 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Sasaran ***Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
 - 1) Program Pengelolaan Pelayaran

Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.659.790.022
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	28.927.508.229
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	1.100.400.000
	Total	41.687.698.251



Untuk Anggaran tahun 2023 analisa penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan hanya terbatas sampai dengan triwulan II (juni) karena merupakan tahun berjalan yang mana pencapaian kinerja yaitu sebesar 51,19%.

Adapun secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan hingga Triwulan II pada tahun 2022 (tahun berjalan), sebagaimana berikut ini :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan yaitu jumlah perlengkapan jalan dan pendukung lalu lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas adalah 8 jenis perlengkapan jalan dari target 12 jenis.

1.1.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 915.389.050 dari target anggaran Rp. 1.625.377.600 atau 56,32%. Capaian realisasi fisik adalah 11 unit yaitu pengecatan marka jalan (3 unit), zebra cross (6 unit) dan zona selamat sekolah (ZoSS) (2 unit) dari target fisik 48 unit.

1.1.2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 12.665.015.610 dari target anggaran Rp. 23.807.659.929 atau 53,19%. Realisasi fisik 488 unit yaitu perlengkapan PJU jalan lingkungan, perlengkapan PJU Tahap I, pemeliharaan cctv/atcs, pemeliharaan flashing light dan pemeliharaan traffic light dari target fisik 968 unit.

1.2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan yaitu jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II adalah 2 kegiatan.



1.2.1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 372.590.240 dari target anggaran Rp. 886.283.600 atau 42,04%. Realisasi fisik adalah 6 laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota.

1.2.2. Forum Lalu Lintas dan Angkutran Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 32.762.500 dari target anggaran Rp. 58.210.000 atau 56,28%. Realisasi fisik 5 laporan yang telah dihasilkan sampai dengan triwulan II dari target fisik 4 laporan.

1.3. *Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.*

Indikator kegiatan yaitu jumlah angkutan orang yang tersedia adalah 10 unit.

1.3.1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 290.290.477 dari target anggaran Rp. 597.420.400 atau 48,59%. Realisasi fisik telah terlaksana 10 unit kendaraan BRT.

1.3.2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 27.348.083 dari target anggaran Rp. 61.797.200 atau 44,25%. Realisasi fisik 6 laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan dari target fisik 12 laporan.

1.4. *Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir*

Indikator kegiatan yaitu jumlah lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran sampai dengan triwulan II adalah 150 titik perparkiran dari target 300 titik.



1.4.1 *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.*

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 619.679.050 dari target anggaran Rp. 1.376.780.000 atau 45%. Realisasi fisik 6 laporan dari target 12 laporan.

1.5. *Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*

Indikator kegiatan yaitu jumlah kendaraan bermotor yang diuji sampai dengan triwulan II (juni) adalah sebanyak 5.061 unit kendaraan dari target 17.000 unit kendaraan atau 29,77%.

1.5.1. *Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor*

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 182.750.000 dari target anggaran Rp. 184.509.221 atau 99,05%. Realisasi fisik 1 unit yaitu pembuatan halaman parkir Pengujian Kendaraan Bermotor, dari target fisik 1 unit.

1.5.2. *Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 89.469.650 dari target anggaran Rp. 257.113.179 atau 34,79%. Realisasi fisik yaitu 1 unit sapras pemeliharaan pintu gedung uji kendaraan bermotor dari target fisik 7 unit.

1.5.3. *Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 24.102.249 dari target anggaran Rp. 72.357.100 atau 33,31%. Kegiatan pengawasan PKB telah dilaksanakan sebanyak 6 laporan sampai dengan triwulan II dari target 12 laporan.

2. *Program Pengelolaan Pelayaran*

2.1. *Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau*

Indikator kegiatan yaitu jumlah kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pada pelabuhan dan angkutan penyeberangan.



Sampai dengan triwulan II ada 2 kegiatan yang telah dilaksanakan dari target 3 kegiatan atau 66,66%.

2.1.1. Pembangunan pelabuhan sungai dan danau

Sub kegiatan ini belum dilaksanakan.

2.1.2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 246.519.126 dari target anggaran Rp. 577.360.000 atau 42,69%. Realisasi fisik 5 unit Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan terpelihara.

2.1.3. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 149.317.100 dari target anggaran Rp. 323.040.000 atau 46,22%. Realisasi fisik yaitu 6 laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau dari target fisik 12 laporan.

Untuk lebih rinci capaian kinerja hingga triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
DINAS PERHUBUNGAN
TRIWULAN II TAHUN 2023

Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/kegiatan/output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	
Tujuan : Meningkatkan kualitas transportasi		Rata-rata Waktu Tempuh per Km	Penjelasan: Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu lokasi dengan batas kecepatan maksimal yang ditetapkan	0,05	jam		0,044	jam		0,05	jam																		
Sasaran : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan	Hasil survei Kepuasan Masyarakat	58			58			58																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		100	%	59.729.559.527	100	%	11.646.558.669	100	%	11.659.790.022	100	%	2.339.081.158	100	%	3.384.710.296											
		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		100	%	59.729.559.527	100	%	11.646.558.669	100	%	11.659.790.022	100	%	2.339.081.158	100	%	3.384.710.296											
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah		86	dokumen	99.809.080	23	dokumen	20.973.400	23	dokumen	15.623.075	8	dokumen	495.000	8	dokumen	4.060.860											
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		36	dokumen	43.072.151	9	dokumen	8.600.600	9	dokumen	7.599.775	2	dokumen	-	3	dokumen	2.638.940											
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		26	dokumen	34.599.600	8	dokumen	6.437.300	8	laporan	5.773.300	3	laporan	495.000	3	laporan	1.421.920											
	Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24	dokumen	22.137.329	6	dokumen	5.935.500	6	laporan	2.250.000	3	dokumen	-	2	laporan	-											
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah		156	bulan	48.797.368.891	12	bulan	8.848.530.460	12	bulan	9.430.372.951	3	bulan	1.966.897.657	3	bulan	2.779.515.173											
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		48	bulan	46.437.510.267	12	bulan	8.427.384.160	67	orang	8.975.709.201	62	orang	1.886.697.657	0	orang	2.653.922.748											
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		48	bulan	2.299.780.000	12	bulan	406.800.000	12	dokumen	445.680.000	3	dokumen	80.200.000	3	dokumen	124.050.000											
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		60	dokumen	60.078.624	15	dokumen	14.346.300	15	laporan	8.983.750	3	laporan	-	4	laporan	1.542.425											



Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianya	300	orang	1.238.480.000	67	orang	343.082.000	67	orang	96.970.000	62	orang	-	-	orang	-	-	-	62	orang	-	129	343.082.000	43,0	28
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1100	stel	1.238.480.000	260	stel	343.082.000	1	paket	96.970.000	0	paket	-	0	paket	-	-	-	0	paket	-	260	343.082.000	23,6	28
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	48	bulan	4.526.877.118	12	bulan	1.261.476.608	12	bulan	807.569.184	3	bulan	86.015.395	3	bulan	264.866.725	-	-	6	bulan	350.882.120	18	1.612.358.728	38	36
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	bulan	62.378.633	12	bulan	25.375.820	1	paket	19.426.312	1	paket	11.215.095	0	paket	-	-	-	1	paket	11.215.095	13	36.590.915	27	59
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	paket	1.365.163.433	1	paket	288.566.000	4	paket	139.708.900	0	paket	-	2	paket	48.700.000	-	-	2	paket	48.700.000	3	337.266.000	75	25
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	48	bulan	573.451.042	12	bulan	462.442.364	2	paket	315.747.072	2	paket	47.429.800	0	paket	73.765.725	-	-	2	paket	121.195.525	14	583.637.889	29	102
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	bulan	1.939.931.010	12	bulan	378.899.300	2	paket	256.719.900	2	paket	-	0	paket	131.021.000	-	-	2	paket	131.021.000	14	509.920.300	29	26
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48	bulan	42.000.000	12	bulan	9.240.000	2920	dokumen	10.000.000	810	dokumen	2.550.000	819	dokumen	1.780.000	-	-	1629	dokumen	4.330.000	1641	13.570.000	3419	32
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	bulan	400.953.000	12	bulan	51.553.124	3	laporan	29.967.000	1	laporan	19.220.500	0	laporan	-	-	-	1	laporan	19.220.500	13	70.773.624	27	18
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	48	bulan	143.000.000	12	bulan	45.400.000	8	dokumen	36.000.000	8	dokumen	5.600.000	0	dokumen	9.600.000	-	-	8	dokumen	15.200.000	20	60.600.000	42	42
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						39.895.000																		
Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebeleur				1	Paket	39.895.000																		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	48	bulan	2.023.835.122	12	bulan	382.340.636	12	bulan	647.384.661	3	bulan	145.119.534	3	bulan	169.837.187	-	-	6	bulan	314.956.721	18	697.297.357	38	34
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48	bulan	44.500.000	12	bulan	10.000.000	12	laporan	10.000.000	0	laporan	-	6	laporan	3.680.000	-	-	6	laporan	3.680.000	18	13.680.000	38	31
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	bulan	1.071.600.322	12	bulan	233.519.036	12	laporan	498.567.061	3	laporan	123.728.934	3	laporan	125.094.787	-	-	6	laporan	248.823.721	18	482.342.757	38	45
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	bulan	907.734.800	12	bulan	138.821.600	12	laporan	138.817.600	3	laporan	21.390.600	3	laporan	41.062.400	-	-	6	laporan	62.453.000	18	201.274.600	38	22



	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	116	unit	3.043.189.316	29	unit	920.735.735	178	unit	661.870.151	36	unit	140.553.572	116	unit	166.430.351					152	unit	306.983.923	181	1.227.719.658	156	40
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	unit	110.499.000	1	unit	38.731.083	1	unit	38.750.000	1	unit	10.367.901	0	unit	7.500.000					1	unit	17.867.901	2	56.598.984	50	51
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	79	unit	2.238.281.916	19	unit	650.871.646	18	unit	485.420.000	17	unit	114.815.421	1	unit	133.891.751					18	unit	248.707.172	37	899.578.818	46,8	40
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32	jenis	583.909.400	8	jenis	135.146.006	155	unit	125.280.000	18	unit	15.370.250	112	unit	22.588.600					130	unit	37.958.850	138	173.104.856	431,3	30
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit rumah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat rumah Gedung Kantor				1	unit	80.972.000																				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4	unit	110.499.000	1	unit	15.015.000	4	unit	12.420.151	0	unit	-	4	unit	2.450.000					4	unit	2.450.000	5	17.465.000	125	16
Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Perbaikan/Perbandingan jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan dibanding kapasitas jalan	8	%		80	%		8	%																		
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perbaikan/Perbandingan antara jumlah perlengkapan jalan yang disediakan atau dilakukan pemeliharaan terhadap perlengkapan jalan yang akan disediakan/dilakukan dipelihara	82	%	110.851.563.771	80	%	28.099.612.025	82	%	28.927.508.229	82	%	6.914.990.475	82	%	8.304.406.434					41	%	15.219.396.909	61	43.319.008.934	74	39
		Persentase Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	82	%	94.462.765.300	80	%	25.792.968.289	82	%	25.433.037.529	82	%	6.188.324.983	82	%	7.392.079.677					41	%	13.580.404.660	61	39.373.372.949	74	42
	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	68	Jenis	94.462.765.300	15	Jenis	25.792.968.289	12	Jenis	25.433.037.529	5	Jenis	6.188.324.983	3	Jenis	7.392.079.677					8	Jenis	13.580.404.660	23	39.373.372.949	33,8	42
	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	33	Jenis	15.699.132.030	9	Jenis	1.796.563.700	48	unit	1.625.377.600	6	unit	136.492.000	5	unit	778.897.050					11	unit	915.389.050	20	2.711.952.750	60,6	17
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Dibangun				1	Paket	897.895.600																				
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	34	Jenis	78.763.633.270	7	Jenis	23.098.508.989	968	unit	23.807.659.929	26	unit	6.051.832.983	462	unit	6.613.182.627					488	unit	12.665.015.610	495	35.763.524.599	1455,9	45



		Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Terlibat dan Lancar	Persentase Perbandingan jumlah jalan dalam kondisi terlibat dan lancar dibandingkan dengan jumlah jalan yang dipavasi	82	%	14.874.627.963	80	%	3.466.527.361	82	%	2.980.491.200	82	%	513.047.242	82	%	829.623.108							41	%	1.342.670.350	61	4.809.197.711	74	32
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			12	Kegiatan	3.318.080.000	2	Kegiatan	975.621.300	2	Kegiatan	944.493.600	2	Kegiatan	156.221.300	0	Kegiatan	249.131.440							2	Kegiatan	405.352.740	4	1.380.974.040	33,3	42
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota			100	lokasi	2.899.980.000	25	lokasi	901.621.300	12	laporan	886.283.600	3	laporan	146.021.300,00	3	laporan	226.568.940							6	laporan	372.590.340	31	1.274.211.540	31	44
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota			40	Bahan	418.100.000	10	Bahan	74.000.000	4	laporan	58.210.000	2	laporan	10.200.000	3	laporan	22.562.500							5	laporan	32.762.500	15	106.762.500	37,5	26
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang yang Tersedia			40	Unit	4.640.708.900	10	unit	636.821.363	10	unit	659.217.600	10	unit	134.256.142	-	unit	183.382.418							10	unit	317.638.560	20,00	954.459.923	50	21
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang tersedia			40	Unit	4.361.748.700	10	Unit	575.418.463	10	Unit	597.420.400	9	Unit	124.717.167	1	Unit	165.573.310							10	Unit	290.290.477	20	865.708.940	50	20
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota			1460	hari	278.960.200	365	hari	61.402.900	12	laporan	61.797.200	3	laporan	9.538.975,00	3	laporan	17.809.108							6	laporan	27.348.083	371	88.750.983	25	32
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik parkir			1200	titik	6.915.839.063	300	titik	1.854.084.698	300	titik	1.376.780.000	75	titik	222.569.800	75	titik	397.109.250							150	titik	619.679.050	450	2.473.763.748	38	36
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			1200	titik	6.915.839.063	300	titik	1.854.084.698	12	laporan	1.376.780.000	3	laporan	222.569.800,00	3	laporan	397.109.250							6	laporan	619.679.050	306	2.473.763.748	26	36
	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan			82	%	1.514.170.508	80	%	630.554.917	82	%	513.979.500	82	%	213.618.250	82	%	82.703.649							41	%	296.321.899	61	926.876.816	74	61
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji			67.500	unit	1.514.170.508	11.680	unit	630.554.917	17.000	unit	513.979.500	2.601	unit	213.618.250	2.460	unit	82.703.649							5.061	unit	296.321.899	16.741	926.876.816	25	61
Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia			1	paket	-	2	paket	279.338.000	1	unit	184.509.221	1	unit	179.650.000	0	unit	3.100.000							1	unit	182.750.000	3	462.088.000	300	-
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana Pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara			8	paket	1.225.636.927	2	paket	275.453.817	7	unit	257.113.179	0	unit	27.157.250	1	unit	62.312.400							1	unit	89.469.650	3	364.923.467	37,5	30
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			576	Hari	288.533.581	144	Hari	75.763.100	12	laporan	72.357.100	3	laporan	6.811.000	3	laporan	17.291.249							6	laporan	24.102.249	150	99.865.349	26,0	35

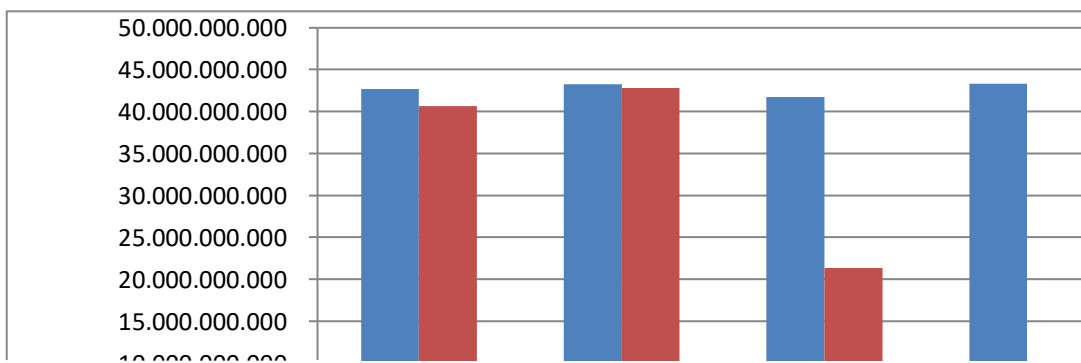


Dari alokasi anggaran dan realisasi anggaran tahun 2023 berdasarkan Pagu Indikatif sebagaimana yang dialokasikan untuk Dinas Perhubungan Kota Pontianak serta realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dan grafik Pagu anggaran sebagai berikut :

Total Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2024

Tahun	2021	2022	2023	2023 (Rencana Perubahan)	2024
Anggaran	42.691.172.205	43.253.956.136	41.687.698.251	43.318.549.199	
Realisasi	40.610.597.238	42.828.540.406	21.339.024.589 (Tw.II/Per Juni)		

Total Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2024 (Per Juni 2023)





BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Berdasarkan isu-isu penting yang kemudian dirumuskan dan dianalisa, maka untuk memadukan, mengarahkan menggerakkan serta memberikan kekuatan, semangat dan komitmen dalam menjalankan roda organisasi sebelum menetapkan tujuan dan sasaran, maka ditetapkan suatu Visi dan Misi Dinas yang menjadi dasar dalam penetapan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

**“ TRANSPORTASI KOTA PONTIANAK YANG CERDAS, TERTIB,
AMAN, LANCAR DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN “**

Adapun penjelasan makna dari Visi Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Dengan melihat dan memperhatikan permasalahan umum dan Tugas Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak serta aspirasi dan masukan yang diterima, maka ditetapkanlah MISI Dinas Perhubungan Kota Pontianak selama Lima Tahun ke depan (Tahun 2020-2024) sebagaimana berikut :

- 1. MENINGKATKAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA APARATUR YANG CERDAS DAN BERBUDAYA**
- 2. MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI, AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN**



3. **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN UNTUK MENCIPTAKAN KETERTIBAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS DARAT DAN SUNGAI**
4. **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI**

Dari ke 4 (empat) misi yang ditetapkan tersebut di atas, maka ditetapkanlah tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan tersebut sebagaimana berikut :

1. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari Visi, Misi Walikota serta telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai oleh kementerian dan Dinas Perhubungan Propinsi yang dirumuskan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kota Pontianak yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang perhubungan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota. Jadi berdasarkan Permasalahan yang ada dan dipadukan dengan telaahan terhadap Visi dan Misi Walikota serta telaahan terhadap Renstra Kementerian, Dinas Perhubungan Propinsi dan telaahan terhadap RTRW Kota Pontianak, dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok yang ada yang harus ditangani dan menjadi fokus untuk periode 5 tahun kedepan (2020-2024), dalam mencapai Misi ke 2 Walikota Pontianak yaitu "*Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif*" adalah bagaimana Dinas Perhubungan Kota Pontianak berupaya memberikan pelayanan berupa peningkatan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, serta meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan tujuan khusus Bidang Perhubungan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020–2024 berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Pontianak adalah :



“Meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak”

Dengan dirumuskannya tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian dari Misi ke 2 Walikota Pontianak dalam menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif.

2. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Sasaran Strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran strategis merupakan arah atau fokus masalah yang akan dibenahi dari masalah pokok yang dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai pada periode 5 tahun.

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan adalah sasaran dibidang perhubungan (transportasi darat dan sungai) yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020–2024. Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dalam upaya pencapaian tujuan *“Meningkatnya Kualitas Transportasi di Kota Pontianak”*, yaitu :

- 1) Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kualitas Transportasi	1.1. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan jalan	1.1.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	B	B	B	B	B
		1.2. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	1.2.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai Dan Dermaga Penyeberangan	80%	80 %	80 %	82 %	82 %



Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi. **Strategi** adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi. Adapun Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak juga akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya..

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah di tetapkan.

Adapun Strategi dan Kebijakan yang di terapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sebagaimana berikut :

1. **Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 5 Strategi, yaitu :

- a. **Strategi 1** : Meningkatkan perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak
- b. **Strategi 2** : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- c. **Strategi 3** : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. **Strategi 4** : Penyelenggaraan dan Pengawasan Fasilitas Parkir
- e. **Strategi 5** : Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi 1 sampai dengan strategi 5, yaitu :

- a. Menyediakan Perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak
- b. Melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- c. Menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- e. Penyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



2 Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 1 Strategi, yaitu :

- a. **Strategi 6** : Pelaksanaan Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengawasan Pelabuhan Sungai dan Danau.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan Strategi 6, yaitu :

- a. Membangun dan Menerbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Dari 6 strategi dengan beberapa arah kebijakan yang dituangkan di atas, akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menetapkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa periode 2020-2024, sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota tahun 2020-2024.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel			
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN			
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024 DALAM PENCAPAIAN MISI 2 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK			
VISI PEMERINTAH KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.			
Misi II PEMERINTAH KOTA : Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kualitas Transportasi	1.1. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.1.1. Meningkatkan Perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak	1.1.1.1. Menyediakan Perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak
		1.1.2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.2.1.1. Melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		1.1.3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.1. Menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.1.4. Penyelenggaraan dan Pengawasan Fasilitas Parkir	1.2.3.1. Menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pengawasan Fasilitas Parkir
		1.1.5. Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.2.4.1. Menyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	1.2. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	2.1.1. Pelaksanaan Pembangunan, Pengoperasian dan Pengawasan Pelabuhan Sungai dan Danau	2.1.1.1. Membangun dan Menerbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau



Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada tahun 2023 disusun berdasarkan Isu strategis daerah dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

- ❖ Mengoptimalkan dan meningkatkan keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dengan memproporsionalkan prioritas belanja yang berbasis kinerja dan program yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- ❖ Mengutamakan belanja publik yang mampu memberikan dampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- ❖ Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan berkesinambungan.
- ❖ Efisiensi Anggaran dikarenakan defisit anggaran Kota Pontianak.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.000.000.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													41.687.698.251,00	43.318.549.199,00		56.440.204,00			
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													11.659.790.022,00	11.714.019.191,00		17.686.036,00		
2	15	1	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													15.623.075,00	15.623.075,00		23.780.000,00	
2	15	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	7.599.775,00	7.599.775,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	10.800.000,00	
2	15	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	8 Laporan	8 Laporan	23 Dokumen	23 Dokumen	5.773.300,00	5.773.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	8.000.000,00	
2	15	1	2.0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	6 Laporan	6 Laporan	23 Dokumen	23 Dokumen	2.250.000,00	2.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	4.980.000,00	
2	15	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													9.430.372.951,00	9.523.110.795,00		12.685.500,00
2	15	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	67 Orang/bula	n63 Orang/bula	n12 Bulan	12 Bulan	8.975.709.201,00	9.023.687.045,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	12.091.500.000,00	
2	15	1	2.0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	445.680.000,00	490.440.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	585.000.000,00	
2	15	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Ke Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	15 Laporan	15 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	8.983.750,00	8.983.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	9.000.000,00	



2	15	1	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											96.970.000,00	96.970.000,00			450.000.000,00				
		2	2.0 5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianya				100%	100%	1 Paket	1 Paket	67 Orang	63 Orang	96.970.000,00	96.970.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	350.000.000,00
		2	2.0 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianya				100%	100%	0 Orang	0 Orang	67 Orang	63 Orang	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	100.000.000,00
2	15	1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											807.569.184,00	666.754.284,00			1.235.760.000,00				
		2	2.0 6	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah				100%	100%	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	19.426.312,00	19.426.312,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	15.000.000,00
		2	2.0 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah				100%	100%	4 Paket	2 Paket	12 Bulan	12 Bulan	139.708.900,00	54.986.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	350.000.000,00
		2	2.0 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah				100%	100%	2 Paket	2 Paket	12 Bulan	12 Bulan	315.747.072,00	295.747.072,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	95.760.000,00
		2	2.0 6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah				100%	100%	2 Paket	2 Paket	12 Bulan	12 Bulan	256.719.900,00	229.923.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	500.000.000,00
		2	2.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah				100%	100%	2920 Dokume	n3285 Dokume	n12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	11.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	10.000.000,00
		2	2.0 6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah				100%	100%	0 Laporan	0 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	100.000.000,00
		2	2.0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah				100%	100%	3 Laporan	3 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	29.967.000,00	19.220.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	130.000.000,00
		2	2.0 6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah				100%	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	36.000.000,00	36.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	35.000.000,00



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														-	-					1.646.406.000,00			
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	0 Unit	0 Unit	0 Paket	0 Paket		-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	1.571.406.000,00
2	15	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	0 Unit	0 Unit	0 Paket	0 Paket		-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	75.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														647.384.661,00	674.437.786,00					674.090.000,00			
2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum		100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan		10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	12.000.000,00
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum		100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan		498.567.061,00	525.620.186,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	282.090.000,00
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum		100%	100%	0 Laporan	0 Laporan	12 Bulan	12 Bulan		-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	120.000.000,00
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum		100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan		138.817.600,00	138.817.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	260.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														661.870.151,00	737.123.251,00					970.500.000,00			
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100%	100%	1 Unit	1 Unit	178 Unit	178 Unit		38.750.000,00	38.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	50.000.000,00
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100%	100%	18 Unit	18 Unit	178 Unit	178 Unit		485.420.000,00	556.373.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	570.000.000,00
2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100%	100%	155 Unit	155 Unit	178 Unit	178 Unit		125.280.000,00	129.580.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	157.500.000,00
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhab	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100%	100%	0 Unit	0 Unit	178 Unit	178 Unit		-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	165.000.000,00
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100%	100%	4 Unit	4 Unit	178 Unit	178 Unit		12.420.151,00	12.420.151,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	28.000.000,00



2	15	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAJ)								28.927.508.229,00	30.754.520.008,00						35.569.248,00		
2	15	2	2.0	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								25.433.037.529,00	27.095.706.259,00						31.439.000,00		
2	15	2	2.0	2	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	82%	82%	0 Unit	0 Unit	12 Jenis	11 Jenis		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	82%	2.000.000.000,00	
2	15	2	2.0	2	2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	82%	82%	48 Unit	48 Unit	12 Jenis	11 Jenis	1.625.377.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	82%	2.190.000.000,00	
2	15	2	2.0	2	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Persentase Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Tersejahtera dan Terpelihara	Jumlah Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	82%	82%	968 Unit	964 Unit	12 Jenis	11 Jenis	23.807.659.929,00	25.582.906.059,00	Persentase Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	82%	27.249.000.000,00	
2	15	2	2.0	4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								1.376.780.000,00	1.426.215.400,00					1.730.000.000,00		
2	15	2	2.0	4	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran	82%	82%	12 Laporan	12 Laporan	300 Titik	300 Titik	1.376.780.000,00	1.426.215.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	82%	1.730.000.000,00
2	15	2	2.0	5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								513.979.500,00	585.677.149,00					335.250.000,00		
2	15	2	2.0	5	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	82%	82%	1 Unit	2 Unit	17000 Unit	17000 Unit	184.509.221,00	298.059.221,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82%	-
2	15	2	2.0	5	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	82%	82%	7 Unit	7 Unit	17000 Unit	17000 Unit	257.113.179,00	231.406.629,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82%	265.000.000,00
2	15	2	2.0	5	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	82%	82%	12 Laporan	12 Laporan	17000 Unit	17000 Unit	72.357.100,00	56.211.299,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	0,82	70.250.000,00
2	15	2	2.0	6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								944.493.600,00	934.143.600,00					888.000.000,00		
2	15	2	2.0	6	1	Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	82%	82%	0 Laporan	0 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	0,82	75.000.000,00
2	15	2	2.0	6	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	82%	82%	12 Laporan	12 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	886.283.600,00	848.583.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	0,82	693.000.000,00
2	15	2	2.0	6	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	82%	82%	4 Laporan	8 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	58.210.000,00	85.560.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	0,82	120.000.000,00



2	15	2	2.0	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										659.217.600,00	712.777.600,00				1.176.998.000,00			
2	15	2	2.0	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	Jumlah Angkutan Orang yang Tersedia		82%	82%	10 Unit	10 Unit	10 Bus	10 Bus	597.420.400,00	650.980.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	0,82	1.106.998.000,00
2	15	2	2.0	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang yang Tersedia		82%	82%	12 Laporan	12 Laporan	10 Bus	10 Bus	61.797.200,00	61.797.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	0,82	70.000.000,00
2	15	3		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN										1.100.400.000,00	850.010.000,00				3.185.000.000,00			
2	15	3	2.1	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau										1.100.400.000,00	850.010.000,00				3.185.000.000,00			
2	15	3	2.1	2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Jumlah Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan		82%	82%	1 Unit	0 Unit	3 Kegiatan	2 Kegiatan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	82%	2.020.000.000,00
2	15	3	2.1	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan		82%	82%	5 Unit	6 Unit	3 Kegiatan	2 Kegiatan	577.360.000,00	554.470.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	82%	600.000.000,00
2	15	3	2.1	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan		82%	82%	12 Laporan	12 Laporan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	323.040.000,00	295.540.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	82%	565.000.000,00
												TOTAL	41.687.698.251,00	43.318.549.199,00				56.440.284,00				



3.2 Pendanaan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak, dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan. Program-program pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak tentunya sesuai dan sebagai upaya dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas yang ditetapkan, yang mengacu kepada apa yang dicita-citakan oleh Pemerintah Kota Pontianak yang dituangkan dalam Visi dan Misi Kepala Daerah (Pemerintah Kota Pontianak).

Program-program pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada tahun 2023 sesuai dengan yang tertuang dalam DPA (Murni) tahun 2023 dengan prioritas kegiatan dan penyerapan aspirasi masyarakat, dengan total anggaran Rp. 41.687.698.251 (termasuk Gaji dan Tunjangan PNS), yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 11.659.790.022 dan 2 (dua) Program Pokok Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.027.908.229.

Sedangkan berdasarkan RKPD Perubahan, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang telah ditetapkan pagu indikatif adalah Rp. 43.318.549.199 (termasuk Gaji dan Tunjangan PNS) bertambah sebesar **3,91% atau sebesar Rp. 1.630.850.948** dari anggaran murni tahun 2023.

Dengan berdasar pada pertimbangan di atas maka Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebelum perubahan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 11.659.790.022 dan direncanakan mengalami perubahan menjadi Rp. 11.714.019.191 (bertambah Rp. 54.229.169 atau 0,47%).
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebelum perubahan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 28.927.508.229 dan direncanakan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 30.754.520.008 (bertambah Rp. 1.827.011.779 atau 6,32%).
3. Program Pengelolaan Pelayaran sebelum perubahan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.100.400.000 dan direncanakan mengalami



perubahan menjadi sebesar Rp. 850.010.000 (berkurang Rp. 250.390.000 atau 22,75%).

Adapun secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan pada anggaran perubahan untuk tahun anggaran 2023 sesuai plafon anggaran pagu indikatif perubahan yang ditetapkan, yaitu sebagaimana berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, tidak ada mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu tetap dengan pagu Rp. 15.623.075.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari anggaran Rp. 9.430.372.951 menjadi Rp. 9.523.110.795 (bertambah Rp. 92.737.844 atau 0,98% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 8.975.709.201 menjadi Rp. 9.023.687.045.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 445.680.000 menjadi Rp. 490.440.000.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. 8.983.750.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan yaitu dengan anggaran Rp. 96.970.000.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mengalami perubahan yaitu pengurangan anggaran dari anggaran murni Rp. 807.569.184 menjadi Rp. 666.754.284 (berkurang Rp. 140.814.900



atau 17,43% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. 19.426.312.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami perubahan anggaran berupa penurunan dari pagu murni Rp. 139.708.900 menjadi Rp. 54.986.500.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 315.747.072 menjadi Rp. 295.747.072.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 256.719.900 menjadi Rp. 229.923.900.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 10.000.000 menjadi Rp. 11.450.000.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 29.967.000 menjadi Rp. 19.220.500.
 - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 36.000.000.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yaitu penambahan dari anggaran murni Rp. 647.384.661 menjadi Rp. 674.437.786 (bertambah 27.053.125 atau 4,17% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. 10.000.000.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 498.567.061 menjadi Rp. 525.620.186.



- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. 138.817.600.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yaitu adanya penambahan anggaran pada anggaran perubahan dari anggaran murni Rp. 661.870.151 menjadi Rp. 737.123.251 (bertambah Rp. 75.253.100 atau 11,36% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. 38.750.000.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 485.420.000 menjadi Rp.556.373.100.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 125.280.000 menjadi Rp. 129.580.000.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 12.420.151.

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari anggaran murni Rp. 25.433.037.529 menjadi Rp. 27.095.706.259 (bertambah Rp. 1.662.668.730 atau 6,53% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 1.625.377.600 menjadi Rp. 1.512.800.200.
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 23.807.659.929 menjadi 25.582.906.059.



2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir mengalami perubahan yaitu penurunan dari pagu anggaran murni Rp. 1.376.780.000 menjadi Rp. 1.426.215.400 (bertambah Rp. 49.435.400 atau 3,59% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 1.376.780.000 menjadi Rp. 1.426.215.400.

3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mengalami perubahan yaitu penurunan anggaran dari anggaran murni Rp. 513.975.500 menjadi Rp. 585.677.149 (bertambah Rp. 71.701.649 atau 13,95% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 184.509.221 menjadi Rp. 298.059.221.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 257.113.179 menjadi Rp. 231.406.629.
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 72.357.100 menjadi Rp. 56.211.299.

4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan mengalami perubahan berupa penurunan anggaran dari anggaran sebesar Rp. 944.493.600 menjadi Rp. 934.143.600 (berkurang Rp. 10.350.000 atau 1,09% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 886.283.600 menjadi Rp. 848.583.600.



- Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 58.210.000 menjadi Rp. 85.560.000.
5. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota juga mengalami perubahan yaitu dari anggaran murni Rp. 659.217.600 menjadi Rp. 712.777.600 (bertambah Rp. 53.560.000 atau 8,12% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
- Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 597.420.400 menjadi Rp. 650.980.400.
 - Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota tidak mengalami perubahan Rp. 61.797.200.

C. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

1. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau mengalami perubahan pagu anggaran dari anggaran murni Rp. 1.100.400.000 menjadi Rp. 850.010.000 (berkurang Rp. 250.390.000 atau 22,75% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
- Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang mana dalam Perubahan Rencana Kerja tidak jadi dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran.
 - Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 577.360.000 menjadi Rp. 554.470.000.
 - Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 323.040.000 menjadi Rp. 295.540.000 (berkurang 27.500.000).



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Perubahan adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang disesuaikan terhadap kondisi dan kebutuhan tahun berjalan yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Rencana Kerja yang merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin Dinas beserta jajarannya dalam merealisasikan Visi dan Misi yang merupakan acuan dasar untuk pencapaian program, kegiatan dan kebijakan pada tahun yang ditetapkan. Dengan demikian, Rencana Kerja bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan rencana di atasnya (Renstra OPD, RKPD dan RPJMD Kota Pontianak) serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Program-program yang akan dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak tahun 2023 Anggaran Perubahan dengan total 3 Program, 13 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan Kesekretariatan) yang terdiri dari 7 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan serta pada 2 (dua) Program



Pokok Pembangunan Urusan Perhubungan yang terdiri dari 6 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pontianak menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Pontianak memiliki Misi, Visi, Tujuan dan Sasaran selaras dengan apa yang dituangkan dalam Renstra Kota dengan program dan kegiatan yang realistis sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan Pusat dan Daerah, Dinas Perhubungan Kota Pontianak tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian jika program dan kegiatan yang diusulkan memang secara prinsip harus disesuaikan. Untuk itu masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk menjadikan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang lebih baik.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK

Dra.Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680410 199503 2 006



Lampiran